

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK

UTAMI DEWI, M.PP
WEEK 1/IMPLEMENTASI DAN
EVALUASI KEBIJAKAN
UNY -2013

PENGERTIAN IMPLEMENTASI

- ❑ Implementasi merujuk pada serangkaian aktivitas yang dijalankan oleh pemerintah dengan mengikuti arahan tertentu tentang tujuan dan hasil yang diharapkan.
- ❑ Implementasi meliputi tindakan –tindakan oleh berbagai aktor, terutama birokrasi, yang sengaja didesain untuk menghasilkan efek tertentu demi tercapainya suatu tujuan.

(Ripley, Randal & Grace A. Franklin)

Implementasi sebagai Proses Interaksi

- ▣ Implementasi merupakan suatu proses interaksi antara penetapan tujuan dengan tindakan-tindakan yang dijalankan untuk mewujudkannya

Proses implementasi bukanlah proses teknis murni, tetapi merupakan proses interaksi sosial politik yang akan menentukan siapa mendapatkan apa, kapan dan bagaimana.

(Philip J Cooper)

Implementasi menurut Malcolm L Goggin

- ▣ Implementasi merupakan suatu proses, serangkaian keputusan dan tindakan negara yang diarahkan untuk menjalankan suatu mandat yang telah ditetapkan.

Implementasi sering diasumsikan sebagai ketaatan negara, atau suatu pemenuhan tuntutan prosedur hukum sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Implementasi menurut Merilee S Grindle

- ▣ Implementasi adalah upaya untuk menerjemahkan kebijakan publik ke dalam berbagai program aksi untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan.

Oleh karena itu, implementasi berkaitan dengan penciptaan "policy delivery system" yang menghubungkan tujuan kebijakan dengan output dan outcome tertentu.

Implementasi menurut Eugene Bardach

Ada 7 konsep implementasi menurut Bardach:

1. Implementasi merupakan proses perakitan sejumlah elemen program yang berbeda.
2. Implementasi merupakan politik tekanan, dimana dengan sendirinya akan mendatangkan tekanan balik.
3. Implementasi merupakan suatu proses pemaksaan kesepakatan secara massal.

4. Implementasi sebagai kontrol administratif
5. Implementasi merupakan proses negosiasi inter pemerintah
6. Implementasi sebagai proses yang ditandai oleh kompleksitas aksi bersama.
7. Implementasi sebagai sistem permainan, yang memerlukan negosiasi, tawar menawar, persuasi, dan kontrol.

Dari ketujuh konsep di atas, sebetulnya dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi ada dua hal yang sangat berkaitan:

1. Proses perakitan berbagai elemen yang dibutuhkan untuk menghasilkan outcome tertentu
2. Proses melakukan berbagai permainan yang saling berhubungan.

Implementasi dan institutional theory

Sebuah kebijakan akan dapat diimplementasikan jika ada institusi yang berwenang untuk melaksanakan. Institusi tersebut mempunyai wewenang dan kewajiban untuk merancang program dan kegiatan dalam melaksanakan kebijakan agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

“Policy implementation needs to be seen as occurring in organized contexts where there are established norms, values, relationships, power structures and standard operating procedures”

“Policy institution refer to the particular machinery of government which controls the authority and the resources needed to sustain policy”

Lembaga legislatif dan birokrasi pemerintah merupakan institusi utama dalam pembuatan dan implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan akan berhasil kalau institusi pembuat kebijakan tepat dalam menentukan kebijakan dan tujuan serta institusi implementor mampu menciptakan program dan kegiatan yang tepat bagi *beneficiaries*. Institusi pelaksana perlu saling kerja sama setelah sebelumnya tercipta suatu konsensus melalui proses negosiasi dan *bargaining interests*.

Implementasi dan Postmodernist theory

Ketika kita bicara tentang post modern, maka kita akan menunjuk pada suatu keterbukaan informasi, globalisasi, multi national company, dan lain-lain.

Implementasi kebijakan sangat berkaitan dengan upaya untuk mengadopsi perubahan dan inovasi agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan.

Organisasi publik perlu mengadopsi ciri-ciri organisasi modern dan demokratis agar kebijakan publik dapat terlaksana dengan baik.